

Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya Kabupaten Muara Enim

Siti Zubaidah¹⁾

¹⁾ Program Studi Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bala Putra Dewa
Jl Bambang Utoyo, Gedung Bina Warga Kode Pos : 30114
Email : siti0213079002@gmail.com¹⁾

Abstract

The road construction is a vital requirement as a major supporter of the dynamics and economic activity, both at central and local and regional development as well as major infrastructures for the national economy. As an important part in the activities of the road management Roads Towards Botanical Sriwijaya Muara Enim regency were in need of supervisory activities road handed over to a third party or agent . The results of the study are limited capability of human resources supervisor professional while goal setting tailored to the type of work while still limited budget available for operational purposes supervisor. For the problem of the execution time is already in accordance with the applicable procedures and agreed upon by several stakeholders, sometimes constrained by natural conditions, especially when the rainy season is very annoying time of the existing activities in the field. Scheduling is the process of preparing a list of work to be done to achieve and realize a certain goal and Examination Report has been carried out in accordance with the Terms of Reference but there are obstacles reports submitted did not follow up on the implementation of the work.

Keywords: *Analysis, Implementation, Monitoring, Development, Road Access*

Abstrak

Pembangunan jalan merupakan kebutuhan yang sangat vital sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi, baik di pusat maupun daerah dan pengembangan wilayah serta sebagai prasarana penunjang yang utama bagi perekonomian nasional. Sebagai bagian penting dalam kegiatan penyelenggaraan jalan maka Pembangunan Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya Kabupaten Muara Enim juga memerlukan adanya kegiatan pengawasan jalan yang diserahkan kepada pihak ketiga atau konsultan. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia pengawas yang profesional sedangkan penentuan tujuan disesuaikan dengan jenis pekerjaan sedangkan anggaran yang tersedia masih terbatas untuk keperluan operasional pengawas. Untuk masalah waktu pelaksanaan memang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan disepakati oleh beberapa pihak terkait, terkadang terkendala oleh keadaan alam terutama waktu musim penghujan sangat mengganggu waktu pelaksanaan kegiatan yang ada dilapangan. Penjadwalan merupakan proses penyusunan daftar pekerjaan yang akan dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan suatu tujuan tertentu dan Laporan Hasil Pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja namun laporan yang disampaikan terdapat kendala tidak adanya tindak lanjut dari pelaksanaan pekerjaan.

Kata kunci : *Analisis, Pelaksanaan, Pengawasan, Pembangunan, Jalan Akses*

1. Pendahuluan

Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan jalan menjadi hal yang dianggap mendesak manakala kegiatan ekonomi masyarakat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan (Cakra, 2009). Ditinjau dari sudut pandang ekonomi jalan merupakan barang publik. Barang publik adalah barang yang memiliki karakteristik non – rival dan nonexclude. Non – rival adalah barang yang dapat dikonsumsi bersamaan dengan barang lain pada waktu yang sama (joint consumption) tanpa saling meniadakan manfaat, sedangkan non – exclude adalah barang yang apabila seseorang ingin mendapatkan manfaat dari barang tersebut maka tidak perlu membayar (Cakra, 2009).

Pembangunan jalan merupakan kebutuhan yang sangat vital sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi, baik di pusat maupun daerah dan pengembangan wilayah serta sebagai prasarana penunjang yang utama bagi perekonomian nasional. Jalan juga memiliki manfaat strategis yaitu antara lain menciptakan lapangan pekerjaan berskala besar, peningkatan penggunaan sumber daya dalam negeri serta meningkatkan sektor riil dengan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional.

Di Indonesia setelah adanya otonomi daerah, penyelenggaraan jalan terbagi atas tiga kewenangan yaitu : pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota. Pemerintah pusat berwenang dalam penyelenggaraan jalan nasional dan jalan tol, pemerintah daerah provinsi berwenang dalam penyelenggaraan jalan provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten / kota. Dalam hal ini penyelenggaraan jalan diartikan sebagai kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang – undangan jalan; Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan; Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan; sedangkan Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan (Cakra, 2009).

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Provinsi Sumatera Selatan memiliki jalan nasional sepanjang 1.444.261 km, jalan provinsi sepanjang 1.462.874 km. Secara umum kondisi jalan provinsi tersebut pada tahun 2014 adalah : 81,592 % kondisi baik, 14,614 % sedang, 1,757 % rusak ringan,

2,037 % rusak berat atau 81,592 % kondisi mantap dan 18,408 % tidak mantap.

Selaku pembina teknis jalan, Dinas PU memberikan gambaran tentang proses perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan jalan. Perencanaan jalan nasional didasarkan kepada Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah sebesar 8 – 10 ton, artinya untuk seluruh jalan yang ada beban maksimal suatu sumbu tunggal kendaraan adalah 8 – 10 ton, jika melebihi maka umur rencana jalan akan berkurang secara drastis. Pada kegiatan konstruksi pembangunan jalan, setiap unit pelaksanaan konstruksi selalu diawasi secara seksama oleh pemerintah sebagai pemilik proyek dan konsultan pengawas, sehingga sangat mustahil adanya penyimpangan mutu.

Pada kegiatan pemeliharaan jalan, pada dasarnya pemeliharaan rutin (routine) dan berkala (periodic) dilakukan secara terjadwal setiap periode tertentu dan perbaikan jalan (betterment) dilakukan hanya pada kondisi kerusakan struktural jalan. Dari proses yang sangat panjang ini dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa kerusakan jalan yang ada tidak mungkin terjadi pada mutu konstruksi, namun kemungkinan terjadi pada proses pemeliharaan jalan, namun itupun bukan merupakan kerusakan struktural seperti sering terlihat di lapangan saat ini. Dugaan terbesar untuk kerusakan jalan yang ada saat ini adalah diakibatkan karena beban berlebih (overloading) dari kendaraan berat. Sekali saja terjadi kerusakan struktural dari suatu jalan maka akan berdampak secara efek domino kepada struktur jalan disekitarnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk mendukung terciptanya infrastruktur jalan yang memadai bagi kemajuan pembangunan di daerahnya. Salah satu pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah Pembangunan Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim. Dana pembangunan jalan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pembangunan Jalan ini sudah dimulai dari tahun 2014, kemudian dianggarkan kembali pada tahun 2015. Pembangunan jalan ini bertujuan sebagai akses untuk menuju Kebun Raya Sriwijaya.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dalam Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tersebut di atur bahwa penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi :

1. Pengaturan Jalan, yakni perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang – undangan jalan;
2. Pembinaan Jalan, yakni kegiatan penyusunan pedoman standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
3. Pembangunan Jalan, yakni kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan

konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan;

4. Pengawasan Jalan, yakni kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.

Sebagai bagian penting dalam kegiatan penyelenggaraan jalan maka Pembangunan Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya Kabupaten Muara Enim juga memerlukan adanya kegiatan pengawasan jalan yang diserahkan kepada pihak ketiga atau konsultan.

Tujuan dilaksanakan pengawasan adalah :

1. Untuk menjadikan pelaksanaan dan hasil kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan.
2. Untuk memecahkan masalah.
3. Untuk mengurangi resiko kegagalan suatu rencana.
4. Untuk membuat perubahan – perubahan maupun perbaikan – perbaikan.
5. Untuk mengetahui kelemahan – kelemahan.

Salah satu Perusahaan Konsultan yang bergerak di bidang pengawasan pembangunan jalan adalah CV. Aktrinindo. CV. Aktrinindo merupakan perusahaan konsultan yang diberikan kepercayaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan kegiatan pengawasan pada kegiatan Pembangunan Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya Kabupaten Muara Enim.

Kebun Raya adalah bagian dari kekayaan bangsa yang merupakan Pusat Pengetahuan Botani, Kawasan Konservasi, Kawasan Pendidikan dan Penelitian, dan sekaligus sebagai sarana Rekreasi di alam terbuka. Diseluruh dunia saat ini ada sekitar 2000 kebun raya, sedangkan di Indonesia sekarang baru ada 7 Kebun Raya, yaitu :
(<https://www.google.co.id/#q=pengertian+dan+contoh+k+ebun+raya>)

Pengembangan Kebun Raya Sriwijaya oleh Pemprov Sumsel ternyata juga didukung lima Perusahaan besar yang ada di Sumatera Selatan. Kelima perusahaan tersebut, Conocco Philips (Grissik) LTD, PT Medco E&P Indonesia, Pertamina JOBP Talisman Jambi Merang, PT Sele Raya Merangin Dua, dan PT Pupuk Sriwijaya. Hal ini ditandai dengan Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) antara Pemprov Sumsel dengan perusahaan tersebut. Penandatanganan MOU sendiri disaksikan langsung Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, Rabu 18 Februari 2015 di Griya Agung Palembang.

Kebun Raya Sriwijaya dibangun diatas lahan 100 hektar. Pengembangan Kebun Raya Sriwijaya ini menghimpun dana dari perusahaan yang mengeksplorasi kekayaan alam di Sumsel tentunya memberikan andil dan memberikan andil dalam membangun Sumsel.

Lokasi Kebun Raya Sumatera Selatan berada di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, letaknya di kawasan ATP II dekat dengan komplek

Agro Techno Park I (ATP I). Lokasinya di tepi jalan desa, sekitar 8 km masuk dari jalan raya lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Kota Palembang – Kabupaten Muara Enim atau pun bias lewat jalan alternative melalui desa bakung sejauh 6 Km menuju lokasi Kebun Raya.

Kebun Raya Sumatera Selatan (KR Sumsel) mempunyai luas sekitar 100 ha terletak pada lahan Agro Techno Park II (ATP II). Lahan untuk dijadikan Kebun Raya Sumatera Selatan didukung juga oleh Keputusan Menteri Kehutanan RI No: SK.485/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan tujuan Khusus Untuk Hutan Penelitian Dan Pengembangan Serta Pendidikan Lingkungan Dalam Bentuk Kebun Raya Sumatera Selatan Pada Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Di Konversi di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 100 (seratus) Ha. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 553/KPTS/BALITBANGDA/2011 tentang Perubahan Lokasi Pembangunan Kebun Raya Sumatera Selatan.

Kawasan ini sudah memiliki batas yang tegas dan jalan tanah yang memisahkan area dengan lahan penduduk dan area lainnya. Secara fisik, batas lokasi ini masih perlu dipertegas dengan membuat patok batas permanen dari beton atau pagar batas lokasi. Batas Sebelah Timur : Jalan Kebun Kelapa Sawit, Batas Sebelah Utara : Rawa, Batas Sebelah Barat : Kebun Kelapa Sawit, dan Batas Sebelah Selatan : Jalan Desa.

Kebun Raya Sriwijaya dibangun di Inderalaya Utara terletak di Km 45 dengan kondisi lahan kering dan rawa-rawa. Didalamnya terdapat pusat konservasi riset lahan basah di Indonesia. Lokasi dan legal izin sudah sesuai izin dari Kementerian Kehutanan RI, akan dibangun dengan 13 zona yang pembangunannya melibatkan perusahaan yang ada di Sumsel. Didalam Kebun Raya sriwijaya sendiri terdiri dari perpusatakan, riset, rumah paranet, pusat riset ikan belida, lahan pembibitan, lahan komposting, solar cell dan lain-lain.

Sumsel akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 di Palembang, tentunya masyarakat Sumsel dapat memerlukan Kebun Raya Sriwijaya dalam Asian Games Tersebut, dengan luas lahan 100 hektar sendiri masih memungkinkan untuk ditambah dan diperluas, tentunya dalam mengembangkan sistem rawa di dalamnya. Luas Kebun Raya Sriwijaya sendiri nantinya lebih besar dari Kebun Raya Bogor untuk itu Jalan akses menuju kesana haruslah dapat ditempuh dengan cepat.

Pemerintah dan rakyat Indonesia saat ini dalam masa pembangunan, bertujuan untuk mencapai cita - cita dan tujuan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus meningkat dan berubah kearah yang lebih baik melalui pelaksanaan program-program pembangunan Jalan yang merupakan jaringan transportasi yang paling dominan digunakan oleh penduduk untuk beraktivitas, karena itu jalan memiliki peranan penting dalam pembangunan wilayah.

Jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas darat. Lancarnya arus jalan akan sangat menunjang perkembangan perekonomian dan sosial suatu daerah. Sehingga pembangunan prasarana dan prasarana transportasi (jalan) akan mempermudah dan mempercepat arus mobilitas barang dan jasa. Pada saat ini telah terjadi proses pembangunan di dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek – aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar. Keseluruhan itu merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik.

Saat ini masalah infrastruktur jalan menjadi agenda penting untuk dibenahi pemerintah daerah, karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan, diantaranya untuk mencapai target pembangunan ekonomi demi mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada dipedesaan. Dalam jangka pendek pembangunan infrastruktur Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya Kabupaten Muara Enim akan menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dalam jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas sektor-sektor ekonomi terkait, sehingga pembangunan infrastruktur jalan dapat dianggap sebagai strategi untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan mobilitas barang.

September 2015 Tahun lalu, Pembangunan infrastruktur jalan menuju dan dalam Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan (Sumsel) sudah dimulai agar akses tempat penelitian dan obat - obatan tersebut semakin mudah dijangkau karena Kebun raya tersebut mengangkat tema kebun obat, dengan mengadopsi konsep kebun raya yang terdapat di China. Nantinya akan dikembangkan beberapa tanaman obat khas Sumatera Selatan. Ada tiga fungsi utama dari Kebun Raya Sriwijaya tersebut, yaitu sarana untuk penelitian, pendidikan, dan rekreasi. Selain itu dibangun juga pulau buatan.

Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Ruslan Bahri mengatakan dalam Rapat pembangunan Kebun Raya Sriwijaya mengungkap,

“memang sekarang ini pembangunan infrastruktur sudah dimulai sehingga transportasi menuju lokasi tersebut semakin cepat. Pembangunan jalan tersebut untuk mempercepat akses dalam kebun raya itu karena arealnya terdiri berbagai macam tempat seperti diantaranya laboratorium, lokasi tumbuh-tumbuhan dan obat-obatan. Jadi itu harus memiliki akses sehingga harus dibangun jalan menuju areal tersebut,” ujar dia usai rapat pembangunan kebun raya di Palembang, Selasa (22/9).

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumsel melaksanakan rapat koordinasi membahas pelaksanaan

pembangunan fasilitas kebun raya Sriwijaya. Beliau juga mengatakan rapat itu sebagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan di kebun raya. Selain itu juga dalam rapat tersebut pihaknya menekankan pembangunan harus dilaksanakan secara profesional karena fasilitas tersebut digunakan dalam jangka panjang.

Sehubungan itu pihaknya melaksanakan rapat dengan instansi terkait untuk mempercepat fasilitas dalam kebun raya tersebut. Pembangunan fasilitas kebun raya tersebut selain menggunakan dana APBN, APBD juga pihak perusahaan yang ada di provinsi itu. Sebagaimana Sumsel membangun kebun raya di kabupaten Ogan Ilir yang di dalamnya terdapat tumbuh-tumbuhan khas daerah, obat-obatan dan tempat penelitian.

Namun dalam pelaksanaan Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya Muara Enim tersebut belum terealisasi secara maksimal karena terlihat pembangunan jalan tersebut belum dapat dijadikan akses cepat menuju ke Kebun Raya Sriwijaya. Kebutuhan akan prasarana jalan yang baik merupakan faktor penunjang lancarnya perekonomian, mengingat kondisi jalan yang kurang maksimal dalam pembangunan menyebabkan terhambatnya proses pengembangan Kebun Raya Sriwijaya tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya untuk menguji keakuratan data digunakan triangulasi metode pengumpulan data, oleh karena itu tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Reduksi data; yaitu pengurangan data-data yang tidak terlalu penting kemudian mengambil data untuk keperluan analisis. Atau pengambilan data-data yang diperlukan dari seluruh data yang didapat untuk keperluan analisis, Display data; agar data lebih mudah untuk dimengerti maka data dikumpulkan dalam bentuk matrik, gambar atau skema sehingga analisis yang digunakan akan lebih akurat dan Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap penarikan kesimpulan, setelah melakukan reduksi dan display terhadap data yang mana data kualitatif ditriangulasikan dengan aturan yang ada, sehingga mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya Kabupaten Muara Enim

2. Pembahasan

A. Pengawasan Pendahuluan

Pada tahap pekerjaan persiapan yaitu sebelum tim pelaksana lapangan mulai bekerja Konsultan telah memperhitungkan perkiraan volume pekerjaan dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Sumber daya manusia sebagai pelaksana pengawasan Pembangunan Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya Kabupaten Muara Enim. Pengawasan pembangunan jalan melibatkan beberapa SDM seperti pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumsel serta Tim teknis dari Konsultan pengawas yang terdiri dari beberapa bagian

seperti site engineer, profesional staff dan lain - lain. Penentuan tujuan disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan serta telah disampaikan dalam Kerangka Acuan Kerja Dalam Dokumen Teknis Usulan Pekerjaan.

Mengenai anggaran pengawasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan. Namun anggaran yang tersedia masih terbatas untuk keperluan operasional pengawas.

Sebelum pengawas melakukan pengawasan tentunya konsultan pengawas harus menyusun Program Kerja Pengawas terlebih dahulu. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi / metodologi pelaksanaan pekerjaan pengawasan merupakan persiapan yang memang harus dilakukan oleh konsultan pengawas.

B. Pengawasan Pelaksanaan

Dalam menyusun Program Kerja Pengawas terlebih dahulu. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi / metodologi pelaksanaan pekerjaan pengawasan merupakan persiapan yang memang harus dilakukan oleh konsultan pengawas. Tugas Pengawas secara umum adalah mengawasi kelancaran pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh rekanan / kontraktor pelaksana, yang menyangkut kuantitas, kualitas, biaya, dan ketepatan waktu pelaksana pekerjaan, sehingga wujud akhir pembangunan jalan dan kelengkapannya sesuai dengan dokumen kontrak pelaksanaan / pemborongan dan telah diterima dengan baik oleh pengguna kuasa / kuasa anggaran / pejabat pembuat komitmen / pejabat pengendali kegiatan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan, serta penyelesaian kelengkapan dokumen pembangunan.

Penyusunan rencana pengawasan telah dilakukan dengan baik mengikuti prosedur dan juga disesuaikan Kerangka Acuan / kerja pelaksanaan Pembangunan Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim. Pada suatu proyek, manajer proyek perlu memperhatikan tentang anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan proyek, manajer tidak dapat menafsirkan bahwa sebesar anggaran itulah akhir biaya proyek. Anggaran adalah suatu perkiraan yang disusun berdasarkan informasi yang tersedia pada saat pembuatan anggaran.

Konsultan pengawas telah melakukan pengawasan dan pengendalian proyek. Dari hasil penelitian tidak ada penyimpangan yang dilakukan mengenai biaya proyek yang digunakan. Biaya yang dikeluarkan sudah sebanding dengan tenaga yang akan dikeluarkan namun masih perlu dipertimbangkan kembali untuk menambah biaya pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan dan pengendalian mutu ini, seluruh pekerjaan kontraktor akan selalu diawasi dan dimonitor secara terus menerus. Metode pelaksanaan harus di cek agar sesuai dengan spesifikasi, bila tidak sesuai kontraktor harus mengadakan penyesuaian untuk perbaikan. Pekerjaan yang diawasi adalah pemasangan geotextil dan timbunan biasa dari sumber galian harus

selalu dikontrol agar didapat hasil yang sesuai. Selanjutnya pemeriksaan bahan material seperti yang telah disebutkan dalam dokumen kontrak juga dimonitor.

Pengawasan dan pengendalian waktu proyek (time control) dilihat dari pengawasan kontrak pekerjaan. Pengawasan dan pengendalian waktu atau bisa kita sebut dengan penjadwalan merupakan alat yang diperlukan guna menyelesaikan suatu proyek. Untuk proyek dengan beberapa kegiatan, tahap pelaksanaan umumnya dapat dibayangkan sehingga penjadwalan tidak begitu mutlak dilakukan. Akan tetapi berbeda masalahnya pada proyek berskala besar dimana selain jumlah kegiatan yang sangat banyak dan rumitnya ketergantungan antar kegiatan tidak mungkin lagi diolah dalam pikiran.

C. Pengawasan Umpan Balik (Setelah Pelaksanaan)

Penjadwalan memiliki pengertian secara khusus sebagai durasi dari waktu kerja yang dibutuhkan untuk melakukan serangkaian aktivitas kerja yang ada dalam kegiatan konstruksi. Penjadwalan juga merupakan proses penyusunan daftar pekerjaan yang akan dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan suatu tujuan tertentu yang juga memuat table waktu pelaksanaannya. Karena penjadwalan proyek merupakan sesuatu yang penting, sehingga dalam merencanakannya harus realistis berdasarkan data - data dan informasi tentang proyek.

Pada umumnya, proyek konstruksi membuat master schedule pada awal pelaksanaan proyek, dimana master schedule tersebut menjadwalkan pekerjaan proyek secara umum dari awal proyek hingga selesainya proyek. Master schedule tersebut biasanya digunakan sebagai pengatur dan pengawasan progres di lapangan. Pada kenyataannya, seringkali jadwal keseluruhan pekerjaan pada master schedule kurang sesuai dengan kondisi terkini yang ada di lapangan.

Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri dari beberapa jenis yaitu Laporan Bulanan yang berisikan : Rencana total kemajuan sejak permulaan dan melaporkan keterlambatan – keterlambatan yang terjadi dengan menyebutkan penyebabnya, selanjutnya saran – saran untuk mengatasinya dan tindakan – tindakan yang telah dilakukan; Perubahan lingkup dan jadwal bila ada; Merinci program dan cara kerja untuk tahap berikutnya. Pada laporan bulanan pertama akan memuat semua data yang didapat tentang rencana pelaksanaan pekerjaan serta metode pelaksanaannya dan saran – saran apabila terjadi perubahan penanganan pelaksanaan pekerjaan berikut perhitungan kembali volume pekerjaan yang terulang dalam rekayasa lapangan / field engineering.

Laporan Akhir berisi ringkasan konstruksi yang telah dilaksanakan, rekomendasi untuk pemeliharaan yang akan datang, segala permasalahan teknis yang muncul selama pelaksanaan, persoalan yang mungkin akan timbul (bila ada), dan berbagai macam perbaikan yang diperlukan di masa datang..

3. Kesimpulan

Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia pengawas yang profesional sedangkan penentuan tujuan disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan serta telah disampaikan dalam Kerangka Acuan Kerja Dalam Dokumen Teknis Usulan Pekerjaan. Mengenai anggaran pengawasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan. Namun anggaran yang tersedia masih terbatas untuk keperluan operasional pengawas.

. Biaya yang dikeluarkan sudah sebanding dengan tenaga yang akan dikeluarkan namun masih perlu dipertimbangkan kembali untuk menambah biaya pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk masalah waktu pelaksanaan memang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan disepakati oleh beberapa pihak terkait, terkadang terkendala oleh keadaan alam terutama waktu musim penghujan sangat mengganggu waktu pelaksanaan kegiatan yang ada dilapangan. Sedangkan pelaksanaan pembangunan jalan raya laporan yang disampaikan terdapat kendala tidak adanya tindak lanjut dari pelaksana pekerjaan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Bina Aksara.
- Asiyanto. 2010. *Metode Konstruksi Proyek Jalan*. Jakarta : UI - Press. Aksara. Jakarta.
- Basuki, Ananto dan Shofwan, 2006. *Penguatan Pemerintah Desa Berbasis Good Governance*, Malang : SPOD Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Bryant, Coraline and White, Louise G., 2004. *Manajemen Pembangunan*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- George R. Terry ,2000. *Prinsip – Prinsip Manajemen*. (edisi bahasa Indonesia). PT. Bumi Aksar a: Bandung.
- Hasan M. Iqbal. 2002. *Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia (Anggota IKAPI). Yogyakarta.
- Hasibuan Malayu. 2003. *Manajemen (Dasar, Pengertian dan Masalah)*. Bumi Aksara. Jakarta
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri, No.5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*